

RESPON INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN ORGANISASI MELANESIAN *SPEARHEAD GROUP*

Oleh : Sinka Ernes Milanova

Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The protracted conflict for Free Papua has become a problem that has not been resolved until now. This separatist movement greatly disturbed Indonesian sovereignty. Indonesia is trying to solve problems safely, peacefully, and effectively, one of which is by joining the Melanesian Spearhead Group. This study discusses the influence and how Indonesia's steps change its status from observer to associate member at the MSG.

To provide more specific accuracy to the results, researchers use the liberalism paradigm and diplomacy theory as a primary reference for research to clarify the effect of changes in Indonesia's status on MSG foreign policy on the issue of an independent Papua and steps to change Indonesia's position in the MSG. The analysis was carried out by analyzing documents, books, officially published journals, news, and Twitter.

The results showed that changes in Indonesia's membership status from observer to associated member led to changes in the dynamics of foreign policy taken by the Melanesian Spearhead Group organization due to differences in rights and obligations held in each position in the Melanesian Spearhead Group. Associate member status allows Indonesia to provide foreign assistance regarding social and economic aspects, weakening their movement and intervention. Disagreements and conflicts among members have caused the agenda for an independent Papua to no longer be the main agenda in MSG discussions.

Keywords: *Separatism, Free Papua, International Organization, Melanesian Spearhead Group.*

Pendahuluan

Isu separatisme yang saat ini terjadi di Papua sebenarnya sudah dapat dilihat saat Indonesia berhasil merebut Papua sebagai bagian dari negara di tahun 1963 yang mana pada awalnya diduduki oleh Belanda. Perebutan Papua oleh Indonesia dari Belanda tersebut dilakukan melalui operasi militer yang disebut juga sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Sebagai wilayah yang didominasi oleh ras Melanesia, Papua mendapatkan dukungan secara politik oleh negara-negara di Pasifik yang tergabung ke dalam organisasi *Melanesian Spearhead Group*. *Melanesian Spearhead Group* atau disingkat juga sebagai MSG adalah sebuah organisasi sub regional yang didirikan pada tanggal 14 Maret 1988 oleh beberapa negara yang memiliki latar belakang ras Melanesia di wilayah Pasifik Selatan, seperti Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, New Caledonia, dan Kepulauan Solomon. Pembentukan MSG yang dilakukan pada tahun 1988 ini ditandai dengan adanya penandatanganan *Agreed Principles* di Port Vila, Vanuatu¹ dan pada tahun 2007 baru mendapatkan pengakuan sebagai salah satu organisasi internasional.² Dalam menyikapi respon dan kritik yang diberikan oleh negara-negara yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua tersebut, upaya dapat dibagi menjadi dua langkah yakni secara damai atau melalui otonomi secara khusus serta pelaksanaan sosialisasi, maupun melalui cara yang lebih tegas seperti berupaya menumpas para pemberontak yang melakukan

gerakan separatis di Papua. Selanjutnya, Indonesia mempunyai sebuah kepentingan nasional untuk mengatasi posisi tidak aman (*insecure*) nya, yakni bagaimana caranya agar kedaulatan Indonesia terbebas dari segala macam ancaman yang berasal dari dalam dan luar wilayahnya. Terkait dengan hal ini, maka Indonesia mengambil kebijakan untuk turut bergabung ke dalam MSG sebagai langkah diplomatis awal. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *the Melanesian Spearhead Group* ke-18 di Fiji Maret 2011, Indonesia diterima dan diberikan status sebagai negara anggota pengamat (*observer member*) di MSG.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang di atas maka dapat diketahui bahwa gerakan-gerakan separatis yang tengah terjadi di Papua memang telah lama terjadi, yang mana upaya separatis tersebut dilakukan oleh Papua sendiri, baik dalam bentuk kekuatan senjata (Organisasi Papua Merdeka) maupun bantuan dari berbagai negara luar negeri seperti negara yang tergabung ke dalam Organisasi *Melanesian Spearhead Group* yang dapat mendukung gerakan separatis negara Papua di mata internasional seperti PBB melalui media. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota pengamat dalam Organisasi *Melanesian Spearhead Group* kemudian memperkuat posisinya dengan merubah status menjadi *associate member* pada nyatanya menyebabkan perubahan dinamika pengambilan keputusan bagi negara-negara pendukung gerakan separatis Papua karena terdapat dua kubu,

¹ Melanesia Spearhead Group Secretariat Info. (2022, Juni 07). Diakses melalui <https://www.msgsec.info/about-msg/> (Diakses pada 07 Juni 2022).

² Tess Newton Cain. (2015). *The Renaissance of Melanesian Spearhead Group*. The New Pacific Diplomacy ANU. Hal 152-153.

yakni negara Pasifik yang mendukung kemerdekaan Papua dan Indonesia yang menginginkan Papua tetap menjadi kesatuan negara Indonesia. Maka dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk meneliti lebih lanjut terkait respon yang diberikan oleh Indonesia terhadap kebijakan Organisasi *Melanesian Spearhead Group* pada isu gerakan separatis Papua dengan judul “Respon Indonesia terhadap Kebijakan Organisasi *Melanesian Spearhead Group*”.

Kerangka Teori

Perspektif Liberalisme

Teori ini secara umum hampir sama dengan teori besar hubungan internasional lain seperti realisme yaitu sama-sama memiliki anggapan tentang bagaimana individu dan negara bertingkah laku. Berbeda dengan teori realisme yang sangat meninggikan posisi negara, teori ini kemudian memiliki dua anggapan tentang negara dan salah satu anggapan atau pandangan liberalisme terhadap sebuah negara adalah bahwa negara adalah “penengah”. Yang dimaksud penengah dalam hal ini adalah bahwa negara menjadi jembatan bagi individu di dalam negara untuk menjalankan kepentingan-kepentingan yang ada. Meski begitu, negara kemudian juga memberi batasan agar saat individu menjalankan kepentingan, tidak ada individu lain yang merasa terusik.³ Selain pandangan tentang negara, teori liberalisme ini juga memiliki asumsi-asumsi. Sama dengan realisme, teori ini beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional yang kemudian juga memiliki keinginan untuk

mencapai kepentingan-kepentingan. Sumsi lain dari teori ini adalah bahwa kebebasan individu tidak boleh dikekang. Selain itu, teori ini juga berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang universal dan tidak terbatas oleh identifikasi negara bangsa.⁴ Oleh sebab itu, sangat mungkin bagi individu satu sama lain melakukan interaksi dan kerjasama.

Teori Diplomasi

Diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam mengatur dan menjalin suatu hubungan dengan negara-negara sekitarnya. Pengertian diplomasi menurut Haji Agus Salim yakni cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh suatu negara dalam mencapai kepentingannya. Sedangkan menurut Satow, diplomasi merupakan sebuah manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional.⁵ Suatu Negara melakukan upaya diplomasi untuk mengejar kepentingan nasional dengan cara saling tukar-menukar informasi secara rutin dengan negara lain atau rakyat di negara lain. Diplomasi ini juga diperlukan oleh Negara untuk mengubah sikap dan tingkah laku lawannya. Mengandalkan manajemen hubungan internasional yang dilakukan oleh para diplomat di luar negeri tidak cukup untuk membuat diplomasi tersebut sukses, akan tetapi juga harus memperhatikan beberapa

³ Steans Jill dan Lloyd Pettiford. (2009). *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 118.

⁴ Ibid. Hal. 111.

⁵ Sukawarsini Djelantik. (2008). *Diplomasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 3.-4.

elemen seperti kebijakan dari menteri luar negeri, maupun publik itu sendiri.⁶

Kepentingan nasional Indonesia dalam hal keanggotaannya di MSG yakni bertujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI di Papua Barat, sehingga negara-negara yang tergabung dalam MSG tidak akan melakukan intervensi berkaitan dengan isu di Papua Barat. Dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya tersebut diupayakan oleh Indonesia melalui jalur diplomasi.

Tingkat Analisis Negara-Bangsa

Tingkat analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisis negara bangsa atau *state-level analysis*. Tingkat analisis menurut Kenneth N. Waltz adalah faktor-faktor penjelas. Tingkat analisis ini berupaya untuk menjelaskan variabel penelitian berdasarkan perilaku negara yang ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Maka dalam menggunakan tingkat analisis negara, dibutuhkan pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan, dan badan legislatif) dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui dokumen

resmi yang dikeluarkan pihak terkait, artikel, laporan, arsip ataupun sumber online lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen. Analisis dokumen adalah prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen baik materi cetak maupun elektronik. Dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen mensyaratkan bahwa data diperiksa dan ditafsirkan untuk memperoleh makna, memperoleh pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan empiris.

Pembahasan

Diplomasi Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional di MSG

Adapun beberapa upaya atau strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap MSG:

Diplomasi Ekonomi

a. Diplomasi Bilateral antara Indonesia dengan Negara-Negara Anggota MSG

Pada tahun 2015 Presiden Jokowi beserta rombongan mengunjungi PNG dengan membahas peningkatan kerja sama di berbagai bidang.⁸ Di tahun yang sama Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan mengunjungi Fiji sebagai respon atas gerakan ULMWP yang statusnya menjadi anggota peninjau di MSG.⁹ Menlu

⁶ Ibid. Hal. 14-15.

⁷ Yessi Olivia. (2013). Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. Jurnal Transnasional. Volume 5. Nomor 1. Hal. 139.

⁸ Liputan 6. (2015, Mei 12). Jokowi Terkesan Melihat Kemajuan Papua Nugini. liputan6.com. Diakses melalui

<https://www.liputan6.com/news/read/2230492/jokowi-terkesan-lihat-kemajuan-papua-nugini>.

⁹ Anggi Kusumadewi. (2016, 28 Maret). Luhut Melawat ke Fiji, Perkuat Posisi RI di Pasifik Selatan. CNN Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016032>

Indonesia juga melakukan kunjungan kerja pertama ke tiga negara anggota MSG yakni Kepulauan Solomon, PNG, dan Fiji. Dalam kunjungan tersebut Menlu Indonesia memberikan enam set mesin pengolah kerajinan kerang yang terdiri atas tiga unit mesin potong dan tiga unit mesin bor.

b. Diplomasi Ekonomi Kemaritiman Indonesia dengan Negara-Negara Anggota MSG

Diplomasi kemaritiman era Jokowi memiliki lima pilar yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi saat *East Asia Summit* 2014 yakni, pertama membangun budaya maritim dengan menanamkan nilai kebaharian kepada masyarakat. Kedua penjagaan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara optimal. Ketiga pembangunan infrastruktur fisik seperti tol laut, fasilitas Pelabuhan, dan lain sebagainya. Keempat pembangunan kekuatan maritim untuk keselamatan pelayaran dan keamanan. Kelima kerja sama maritim dengan negara sahabat untuk menghilangkan konflik seperti Kerja sama Selatan-Selatan dengan negara maritim di MSG.

1. Program beasiswa yang diberikan kepada negara anggota MSG dengan nama *Scholarship Program on Fisheries and Marine Human Resource Development for MSG Members*. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan mengenai penangkapan ikan, pengelolaan ikan, dan budidaya perikanan yang disediakan RI di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru, Ambon.¹⁰

2. Program *International Training on Seaweed and Fish Product Development for MSG* merupakan program pelatihan yang kembali dilakukan Indonesia dalam mengembangkan kapabilitas SDM negara anggota MSG. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Forestry Training Center Suva Fiji pada 27 Juni-12 Juli 2016.
3. Program *International Training Program on Fisheries Product Processing and Seashell Handicraft Making* yang diselenggarakan pada 1-7 Desember 2016 di Pulau Pramuka dan Cirebon.

2. Diplomasi Budaya

Festival Melanesia di Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan budaya Melanesia di Indonesia kepada negara-negara anggota MSG, merekatkan persaudaraan se-ras Melanesia, dan meredakan dukungan negara anggota MSG kepada Papua Barat melalui ULMWP.

3. Diplomasi Politik

a. Bali Democracy Forum

Bali Democracy Forum merupakan salah satu elemen diplomasi Indonesia dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Diplomasi Indonesia ini dijadikan ajang unjuk gigi keadaan demokrasi dan HAM di Indonesia yang dimulai dari era Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Jokowi. BDF dihadiri para pejabat negara baik dari

[8120353-20-119997/luhut-melawat-ke-fiji-perkuat-posisi-ri-di-pasifik-selatan/](https://news.okezone.com/read/2014/10/07/65/1049400/ri-beri-beasiswa-ke-tujuh-siswa-negara-pasifik).

¹⁰ R. F. Harahap. (2014, Oktober 08). RI Beri Beasiswa ke Tujuh Siswa Negara Pasifik. News

Okezone. Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2014/10/07/65/1049400/ri-beri-beasiswa-ke-tujuh-siswa-negara-pasifik>.

tingkat kepala negara, menteri, duta besar, maupun dirjen dari organisasi internasional. Selain itu perwakilan negara juga ditunjuk untuk berpidato mengenai kondisi demokrasi di negaranya. BDF juga ini juga turut mengundang MSG. Salah satu tujuan diundangnya negara anggota MSG dan sekretariat MSG pada BDF adalah untuk membahas mengenai penguatan kapasitas demokrasi antar negara, khususnya untuk memiliki komitmen yang tegas dalam menghargai kedaulatan antar negara.¹¹

b. Melanesian Spearhead Group

Strategi politik Indonesia di kawasan Melanesia membuahkan hasil dengan diangkatnya Indonesia menjadi anggota asosiasi di MSG. Dengan klaim bahwa Indonesia memiliki 11 juta populasi warga ras Melanesia, maka Indonesia diterima menjadi anggota asosiasi dengan mewakili 5 provinsi Indonesia. Di tahun yang sama ULMWP juga mengaplikasikan keanggotaan namun hanya mendapatkan status sebagai anggota peninjau.

Anggota asosiasi memberikan Indonesia kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada isu-isu spesifik MSG sedangkan ULMWP tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Posisi Indonesia sebagai anggota asosiasi memberikan Indonesia beberapa hak istimewa di tubuh MSG dan memberikan kekuatan lebih untuk menekan isu kemerdekaan Papua di MSG.

Dengan diterimanya Indonesia di MSG, Indonesia mempunyai ruang untuk menegaskan kembali kedaulatannya atas Papua, dan mampu mempengaruhi keputusan kedepannya terkait gerakan separatis ULMWP. Indonesia mampu membawa arah kebijakan MSG agar tidak memberi pengakuan atas gerakan separatis Papua. Hal ini dapat menjadi faktor eksternal terhadap transformasi kebijakan MSG terhadap masalah Papua.

Perkembangan Kerjasama Indonesia-MSG (*Observer – Associate Member*)

Dalam usaha untuk mencapai prioritas tersebut dalam isu Papua Merdeka, Indonesia meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan terkhusus negara-negara yang berpendudukan Melanesia melalui kerangka kebijakan “*Look East Diplomacy*”.¹² Perwujudannya adalah melalui Politik Luar Negeri Mandiri dan Aktif yang ditunjukkan melalui peningkatan hubungan secara signifikan dengan negara-negara yang tergabung ke dalam organisasi *Melanesian Spearhead Group* atau MSG.

Penjabaran sub-bab di atas maka dapat disimpulkan, Indonesia memiliki tujuan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah, memberikan prioritas pada kawasan Pasifik Selatan khususnya sub kawasan Melanesia untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk mengerahkan dukungan pada Indonesia dan

¹¹ R.R. Georgina. (2016, Juni 18). Indonesia Tolak Gerakan Separatis di MSG. [viva.co.id](https://www.viva.co.id/berita/dunia/786835-indonesia-tolak-gerakan-separatis-di-msg). Diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/dunia/786835-indonesia-tolak-gerakan-separatis-di-msg>.

¹² Kementerian Luar Negeri RI. Meningkatkan Modal Politik Indonesia dalam Peraturan Internasional. Hal. 22-23.

mengimbangi masifnya upaya penggalangan dukungan gerakan separatisme OPM atau ULMWP pada wilayah-wilayah yang berpotensi sebagai sumber dukungan, khususnya subregion Melanesia.¹³

Posisi Indonesia di Melanesian Spearhead Group Sekarang

Untuk melihat posisi Indonesia di MSG terlebih dahulu melihat posisi negara-negara besar di MSG. Pertama, Australia merupakan teman terdekat MSG yang mana memiliki kepentingan yang strategis. Wilayah yang sangat dekat dengan MSG khususnya PNG apalagi PNG adalah negara bekas jajahannya, bahkan PNG dijadikan tameng bagi pertahanan Australia. Meskipun begitu Australia juga menerapkan kebijakan strategis bagi negara anggota MSG yang dijajah Inggris seperti Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon. Hal ini disebabkan karena Inggris adalah sekutu terdekat Australia.¹⁴

Australia bersama New Zealand merupakan negara pendonor utama bagi wilayah Pasifik Selatan khususnya MSG. Apalagi suku asli kedua negara tersebut yakni Aborigin dan Maori merupakan bagian dari ras Melanesia. Di bidang keamanan dibentuk ANZUS yang beranggotakan Australia, New Zealand dan AS sebagai pakta pertahanan yang kuat di Pasifik Selatan.¹⁵

Australia juga kerap kali mendukung gerakan separatis Papua. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan bersama Australia dan Belanda pada 1957 yang mana secara terbuka mendukung tujuan penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat. Pernyataan tersebut jika direalisasikan maka Australia dan Belanda akan terbayang-bayang bahwa bagian-bagian pulau di Papua Barat akan menjadi milik Australia dan Belanda dan memungkinkan terbentuknya negara besar baru bernama Melanesia yang merdeka.¹⁶ Kedua, Perancis merupakan negara yang masih mempertahankan negara wilayah jajahannya di New Caledonia. Pemerintah yang berdaulat merupakan pemerintah yang anti terhadap kemerdekaan karena Perancis selalu memberikan dana bantuan yang sangat besar hingga kini sedangkan kelompok yang pro kemerdekaan yakni FLNKS. FLNKS ini bahkan diterima sebagai anggota *full member* MSG untuk memperjuangkan kemerdekaannya.¹⁷

Penetapan Indonesia sebagai *associate member* di MSG pada 2015, memberikan Indonesia kesempatan yang lebih besar dalam MSG meskipun posisi Indonesia di MSG tergolong rendah dibandingkan Australia dan Perancis. Dari berbagai kesempatan yang didapatkan oleh Indonesia setelah menjadi *associate member*, Indonesia telah mendekati satu langkah lagi untuk menjadi *full member*. *Associate member* (AM) ini tingkatnya lebih besar dari pada *observer member*, di mana *associate member* memiliki hak dan

¹³ Baiq L.S.W. Wardhani. (2015). *Kajian Asia Pasifik*. Malang: Intrans Publishing. Hal. 182.

¹⁴ Dyah Widiastuti. Pemajuan Demokrasi dalam Kebijakan Luar Negeri dan Interaksinya dengan Konsolidasi Demokrasi Domestik Indonesia. *Jurnal Diplomasi*. Volume 7. Nomor 1. Hal. 13-16.

¹⁵ Baiq Wardhani, Op.Cit. Hal. 46-47.

¹⁶ Richard Chauvel, dkk. (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Program Pascasarjana FISIP UI. Hal. 64.

¹⁷ Baiq Wardhani, Op.Cit. Hal. 58-40.

kewajiban yang membuat Indonesia bisa mengikuti segala pertemuan dan agenda yang diadakan MSG. Indonesia juga bisa secara langsung menyampaikan aspirasi dan bernegosiasi langsung dalam MSG.

Associate member Indonesia dalam MSG ini diapresiasi oleh wakil Menlu Indonesia saat 20th *Melanesian Spearhead Group Leaders' Summit* pada 2015. Poin-poin penting yang disampaikan di antaranya: sebagai *associate member* dalam MSG, Indonesia memiliki peluang dalam menjalin kerja sama yang lebih besar dan menguntungkan masing-masing pihak, Indonesia memiliki komitmen dalam menghadapi tantangan perubahan iklim apalagi Indonesia dan MSG merupakan negara kemaritiman yang memiliki banyak pulau yang rentan terhadap bencana alam sehingga perubahan iklim menjadi salah satu isu penting, Indonesia juga berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara anggota MSG dengan dana bantuan untuk membuat pelatihan dan kerja sama.¹⁸

Posisi Indonesia tambah meningkat di MSG terutama setelah Indonesia memberikan dana bantuan 18 juta dollar, dan kembali meningkatkan anggaran bantuan hingga Rp 60 miliar¹⁹ yang mana jumlah ini mengalami peningkatan dari bantuan di tahun 2014 sebesar 20 juta dollar.

Bantuan Indonesia tersebut membuka peluang Indonesia dalam MSG seperti program yang tercantum dalam Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia di

MSG. Posisi Indonesia di MSG pun mulai menggeser posisi-posisi negara besar tetangga MSG seperti Australia dan New Zealand jika dilihat kiprah empat tahun terakhir. Sebagai salah satu tetangga MSG, Indonesia memakai konsep *good neighbor* sama halnya dengan Australia dan New Zealand.

Simpulan

Pada pertemuan KTT Melanesian Spearhead Group ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon pada tanggal 24 Juni 2015 hingga 26 Juni 2015, Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai *associate member* yang mana sebelumnya dari *observer member*.

Sejalan dengan permasalahan Papua, isu kemerdekaan Papua beberapa kali sempat diangkat dalam perbincangan di pertemuan-pertemuan *Melanesian Spearhead Group*. Melihat keberpihakan yang dilakukan oleh negara anggota MSG di Pasifik Selatan terhadap isu Papua merdeka tersebut, Indonesia selanjutnya mengambil langkah untuk masuk menjadi negara anggota MSG, meskipun pada awalnya banyak negara yang menentang keberadaan Indonesia dalam organisasi, akan tetapi Indonesia pada akhirnya juga berhasil meningkatkan status keanggotaannya dari *observer* menjadi *associate member* untuk mengamankan posisinya di organisasi MSG.

Peningkatan status keanggotaan Indonesia tersebut menyebabkan berbagai perubahan dinamika kebijakan yang diambil oleh organisasi *Melanesian*

¹⁸ Statement by H.E. A. M. Fachir Vice Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia at the 20th Melanesian Spearhead Group Leaders' Summit.

¹⁹ Indonesia Baik. (2018). Bantuan Indonesia untuk Negara Pasifik Selatan. Diakses melalui <https://indonesiabaik.id/infografis/bantuan-indonesia-untuk-negara-pasifik-selatan>.

Spearhead Group dikarenakan perbedaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap posisi dalam *Melanesian Spearhead Group*. Status *associate member* memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memberikan bantuan asing seperti dalam aspek sosial, budaya, pemberian bantuan dalam aspek ekonomi pembangunan, ekspor dan impor, hingga beasiswa, sehingga melemahkan pergerakan dan intervensi mereka. Ketidaktepahaman dan konflik di antara anggota juga menyebabkan agenda MSG terkait Papua merdeka tidak lagi menjadi agenda utama dalam pembahasan. Selain itu pasca meningkatkan status keanggotaannya di MSG, Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang lebih tinggi sehingga dapat mencapai tujuan utamanya, yakni mengamankan kedaulatan negara, hal tersebut karena pasca ditetapkan sebagai *associated member* Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa memberikan suara dalam agenda rapat terkait isu yang akan dibahas, mengikuti semua kegiatan organisasi, mendapatkan akses dokumen MSG, hingga boleh melakukan tawar-menawar dalam bidang politik saat dilaksanakan forum MSG.

Berdasarkan pengamatan penulis, perubahan status keanggotaan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut membuahkan hasil sebagaimana tujuan pertama Indonesia bergabung menjadi anggota MSG, tidak hanya meningkatkan ekosistem ekonomi dan sosial Indonesia, tetapi juga terhadap kedaulatan Indonesia, di mana negara-negara anggota MSG yang pada awalnya memberikan dukungan untuk Gerakan Papua Merdeka mulai beralih mendukung Indonesia dan mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI.

Daftar Pustaka

- Cain, Tess Newton. (2015). *The Renaissance of Melanesian Spearhead Group*. The New Pacific Diplomacy ANU.
- Chauvel, Richard, dkk. (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Program Pascasarjana FISIP UI.
- Djelantik, Sukawarsini. (2008). *Diplomasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Georgina, R.R. (2016, Juni 18). Indonesia Tolak Gerakan Separatis di MSG. [viva.co.id](https://www.viva.co.id/berita/dunia/786835-indonesia-tolak-gerakan-separatis-di-msg). Diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/dunia/786835-indonesia-tolak-gerakan-separatis-di-msg>.
- Harahap, R. F. (2014, Oktober 08). RI Beri Beasiswa ke Tujuh Siswa Negara Pasifik. News Okezone. Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2014/10/07/65/1049400/ri-beri-beasiswa-ke-tujuh-siswa-negara-pasifik>.
- Indonesia Baik. (2018). Bantuan Indonesia untuk Negara Pasifik Selatan. Diakses melalui <https://indonesiabaik.id/infografis/bantuan-indonesia-untuk-negara-pasifik-selatan>.
- Jill, Steans dan Lloyd Pettiford. (2009). *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kementerian Luar Negeri RI. Meningkatkan Modal Politik Indonesia dalam Peraturan Internasional..
- Kusumadewi, Anggi. (2016, 28 Maret). Luhut Melawat ke Fiji, Perkuat Posisi RI di Pasifik Selatan. CNN

- Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160328120353-20-119997/luhut-melawat-ke-fiji-perkuat-posisi-ri-di-pasifik-selatan/>.
- Liputan 6. (2015, Mei 12). Jokowi Terkesan Melihat Kemajuan Papua Nugini. liputan6.com. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/2230492/jokowi-terkesan-lihat-kemajuan-papua-nugini>.
- Melanesia Spearhead Group Secretariat Info. (2022, Juni 07). Diakses melalui <https://www.msgsec.info/about-msg/> (Diakses pada 07 Juni 2022).
- Olivia, Yessi. (2013). Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. Jurnal Transnasional. Volume 5. Nomor 1.
- Statement by H.E. A. M. Fachir Vice Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia at the 20th Melanesian Spearhead Group Leaders' Summit.
- Wardhani, L.S.W. Baiq. (2015). *Kajian Asia Pasifik*. Malang: Intrans Publishing.
- Widiastuti, Dyah. Pemajuan Demokrasi dalam Kebijakan Luar Negeri dan Interaksinya dengan Konsolidasi Demokrasi Domestik Indonesia. Jurnal Diplomasi. Volume 7. Nomor 1.